



# Bulletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Bappebti Targetkan Potong  
Angka Pengaduan 50 %**

**SNI Silo Jagung Dalam Skema  
SRG Dukung Pembatasan Impor**



**Transaksi  
Multilateral  
Naik 24,22 %**





4-6

## Berita Utama

- Bachrul Chairi; Prioritas Bappebti Peningkatan Likuiditas & Perlindungan Masyarakat
- Transaksi Multilateral Naik 24,22 %
- Pasar Karet ASEAN Peluang Bagi Indonesia?

7-9

## Berjangka

Ini Isi Perka Bappebti No. 2 Cegah APU dan PPT

10-11

## Pasar Lelang

Ini Isi R-Perpres Pasar Lelang Komoditi

12-13

## Resi Gudang

SRG Mobile Perangkat KUKM Bertransaksi di Bursa Berjangka

## 14-15 Agenda Foto

## 16-17 Aktualita

- Bappebti Targetkan Potong Angka Pengaduan 50 %
- BKDI Menargetkan Kontrak Berjangka Timah Diluncurkan Akhir 2016
- SNI Silo Jagung Dalam Skema SRG Dukung Pembatasan Impor
- FTLC Corong PBK di Perguruan Tinggi

## 18 Analisa

## 19 Breaking News

## 20 Info

## 21 Info SRG

## 22-24 KomiKita

SRG Kontrol Harga dan Tekan Inflasi



## 24-25 Kolom

KBE Produk Multiguna JFX



## 26-27 Kiprah

Lisensi Lokal, Standar Internasional



## Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



### Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

### Penanggung Jawab

Bachrul Chairi

### Redaktur

Marthin Simanungkalit

### Penyunting/ Editor

Taufik KS  
Annisa F Wulandari  
Aryo Guritno

### Fotografer

Apriliyanto  
Poppy Juliyantri  
Gita Regina

### Sekretaris

Katimin

### Alamat Redaksi

Gedung Bappebti  
Jl. Kramat Raya  
No. 172, Jakarta Pusat.

[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:

[humas.bappebti@kemendag.go.id](mailto:humas.bappebti@kemendag.go.id)



Foto : Kepala Bappebti, Bachrul Chairi mengamati back office Jakarta Futures Exchange.

Meningkatkan likuiditas perdagangan berjangka komoditi dan memberi perlindungan maksimal kepada masyarakat, bukanlah pekerjaan yang mudah dan hasilnya bisa dirasakan dalam waktu singkat. Karena itu, Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, sejak menapakan kakinya di Gedung Bappebti, langsung merapatkan barisan dan melakukan pendekatan ke sejumlah stakeholder industri perdagangan berjangka komoditi.

"Selain berkenalan lebih dekat dan menampung aspirasi dari stakeholder, saya pun perlu untuk mengingat kembali mekanisme perdagangan berjangka komoditi," kata Bachrul Chairi.

Maklum, sekitar 20 tahun lamanya Bachrul Chairi tak lagi mengikuti perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi. Karena tugas-tugasnya selama itu tak bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perdagangan berjangka komoditi.

Dari pengakuan Bachrul Chairi, setelah melakukan berbagai pendekatan dengan stakeholder perdagangan berjangka komoditi, disimpulkan bahwa masih tersimpan gelora untuk mewujudkan instrument perdagangan berjangka komoditi sebagai sarana *hedging* dan *prices discovery*.

"Maka langkah selanjutnya adalah perlu membangun *image*. Jika *image*-nya sudah bagus, akan ada *trust* dari masyarakat kepada industri ini. Sehingga kita akan lebih mudah menawarkan produk-produk investasi berbasis kontrak multilateral kepada masyarakat. Karena itu, akan diupayakan sosialisasi yang massif tentang perdagangan berjangka komoditi di kalangan masyarakat dan juga dunia pendidikan," terang Bachrul Chairi.

Gelora meningkatkan perdagangan kontrak berjangka multilateral semakin optimis dengan evaluasi kinerja industri di periode Januari-April 2016. Dari data Bappebti, kontrak multilateral YoY meningkat 24,22 % dari tahun 2015. Tercatat kontrak multilateral periode Januari-April 2016 sebesar 475.646 lot, sedangkan tahun sebelumnya hanya mencapai 382.920 lot.

Di sisi lain, transaksi bilateral pada periode Januari-April 2016 juga bertumbuh sebesar 13,82 % dengan total kontrak 1.891.938 lot dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebanyak 1.626.247 lot.

Topik lain yang menjadi laporan Redaksi di Buletin Bappebti yang kita cintai ini, adalah terbitnya Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, tentang, Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka. Terbitnya Perka Bappebti tersebut mengadopsi rekomendasi dari Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF, yang juga dikenal sebagai Rekomendasi 40+9 FATF.

"Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan dan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang- APU, serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme- PPT," ujar Bachrul Chairi.

"Peranan pialang berjangka dalam menerapkan program APU dan PPT memang perlu dioptimalkan dan diefektifkan. Sehingga mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme," tegas Bachrul Chairi.

Redaksi pada edisi ini juga menurunkan beberapa sajian penting yang tak kalah menariknya. Seperti, R-Perpres tentang pasar lelang komoditi, Regional Ruber Market- RRM dan lain sebagainya.

Salam!





**Bachrul Chairi;  
Prioritas Bappebti Peningkatan  
Likuiditas & Perlindungan Masyarakat**

*Kolaborasi apik antara otoritas dan SRO akan meningkatkan keyakinan pelaku pasar perdagangan berjangka komoditi dalam mencapai target likuiditas dan perlindungan masyarakat.*

Perekonomian Indonesia yang semakin membaik sejak awal tahun 2016 dan ditopang pembenahan industri perdagangan berjangka komoditi, menambah keyakinan pertumbuhan industri melampaui target 20 %. Dukungan *self regulatory organization*- SRO dalam memacu kinerja para pelaku usaha untuk menciptakan iklim perdagangan berjangka komoditi yang semakin kondusif, tampaknya juga akan menjadi amunisi pertumbuhan positif di masa mendatang.

“Meski dulu saya pernah berada di Bappebti, tetapi saat ini saya tergolong baru. Karena nyaris tidak mengikuti perkembangan perdagangan berjangka

komoditi. Sebab itu, prioritas program kerja saya di bidang perdagangan berjangka komoditi dalam jangka pendek adalah peningkatan likuiditas dan perlindungan masyarakat- investor,” jelas Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, dalam acara media *briefing*, yang diselenggarakan di Gedung Bappebti, pada 20 Mei 2016, lalu.

Maka beberapa waktu lalu saya sudah menemui dan melakukan berbagai pertemuan dengan *stakeholder* industri perdagangan berjangka komoditi, tambahanya. “Dalam berbagai kesempatan itu, saya telah menekankan langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk peningkatan likuiditas dan perlindungan

investor. Bappebti tidak mungkin bekerja sendiri, karena itu dukungan SRO sangat penting. Terutama dalam menggairahkan pasar seperti peningkatan *image* dan pengenalan produk-produk kontrak berjangka kepada masyarakat,” tegasnya.

“Kami cukup optimis perdagangan berjangka komoditi di masa mendatang semakin diperlukan kalangan dunia usaha di dalam negeri. Karena keterbukaan pasar yang semakin luas, tentunya memerlukan instrument lindung nilai-*hedging*,” terang Bachrul.

Lebih jauh dikatakan, sebab itu dalam beberapa waktu ke depan kami akan mengusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan izin perdagangan kontrak berjangka komoditi. “Indonesia tercatat sebagai negara produsen terbesar ke lima di dunia untuk komoditi *mining*. Tetapi saat ini di bursa berjangka kita, hanya ada beberapa jenis kontrak berjangka berbasis pertambangan.”

“Kita juga nantinya akan mintakan BUMN sebagai penggerak pasar atau melakukan *hedging* di bursa berjangka yang ada di Indonesia,” ujar Bachrul Chairi.

Di samping itu, untuk menopang perkembangan bursa berjangka, kita juga akan mendorong terciptanya pasar fisik komoditi terutama komoditi yang berorientasi ekspor. “Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI telah berhasil mengembangkan pasar fisik komoditi timah di tanah air. Dan saat ini harga harian timah yang ada di BKDI, sudah menjadi harga acuan dunia,” sebut Bachrul.

Dan dari informasi yang kita terima, tambahanya, BKDI hingga akhir tahun ini telah merencanakan peluncuran kontrak berjangka timah.

“Jadi, langkah-langkah pengembangan pasar akan terus kita dorong. Sehingga amanah undang-undang No. 10 Tahun 2011, yang menjadikan bursa berjangka sebagai sarana *hedging* dan *prices discovery*, dapat tercapai,” imbuh Bachrul Chairi. ☺

Kinerja industri perdagangan berjangka komoditi pada kuartal I tahun 2016, tampak signifikan dengan kenaikan volume transaksi multilateral sebesar 24,22 % atau 475.646 lot. Sedangkan di periode yang sama Januari-April 2015, volume transaksi multilateral hanya mencapai 382.920 lot.

Lebih rinci lagi, akumulasi volume transaksi kontrak multilateral di *Jakarta Futures Exchange*- JFX pada kuartal I yakni sebesar 272.597 lot. Sementara di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI, tercatat sebesar 203.049 lot.

Sementara itu, untuk jenis transaksi bilateral pada periode Januari-April 2016 juga bertumbuh sebesar 13,82 % dengan total kontrak 1.891.938 lot dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebanyak 1.6262.247 lot. Kontrak bilateral di JFX tercatat sebesar 1.317.044 lot, sedangkan BKDI mencapai 574.894 lot.

Kepala Bappebti, Bachrul Chari, dalam keterangannya pada acara media *briefing*, yang diselenggarakan di Gedung Bappebti, 20 Mei 2016, lalu, mengatakan, “harga komoditi memang rentan terkoreksi di pasar global, tetapi saya cukup optimis volume transaksi kontrak multilateral sepanjang tahun 2016 ini akan tumbuh positif seperti yang tercermin pada kuartal I 2016.”

“Tetapi, meski harga komoditi rentan terkoreksi di pasar global, di situlah esensi bursa berjangka yang dapat memberi keuntungan kepada investor di saat harga sedang turun,” jelas Bachrul.

Dampak pelemahan ekonomi di kuartal ketiga 2015, memang masih berpengaruh terhadap harga komoditas di periode Januari-April 2016. Terbukti nilai kontrak transaksi multilateral periode Januari-April 2016 sebesar Rp 4,562 triliun atau turun 31,06 %, dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sejumlah Rp 6,617 triliun.

Hal yang sama juga terjadi pada nilai transaksi kontrak bilateral di periode Januari-April 2016 yang terkoreksi 0,71 %, yakni sebesar Rp 27,957 triliun dari Rp 28,156 triliun di periode yang sama tahun 2015.



**Target JFX**

Direktur Utama JFX, Stephanus Paulus Lumintang, menanggapi perkembangan pasar di tahun 2016 ini, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, kondisi perokonomian global saat ini masih lemah meski ada perbaikan. “Sebab itu, ada kecenderungan risiko di masyarakat, khususnya kalangan investor,” terangnya.

“Oleh karenanya, karakteristik investor di situasi seperti itu akan mencari perlindungan pada produk-produk investasi yang *safe heaven*, seperti

kontrak berjangka emas,” jelas Paulus.

Sementara kontrak berjangka komoditi agrikultur di JFX seperti kontrak Kakao, Kopi, dan Olein, fluktuasi harganya sangat dipengaruhi faktor seperti *supply and demand*, nilai tukar mata uang asing, dan pergantian musim atau iklim.

“Tetapi kami tetap optimis target pertumbuhan transaksi multilateral di JFX akan mencapai 1,5 juta lot di tahun 2016 ini. Dengan program yang sudah dicanangkan dan tambahan kontrak berjangka multilateral hingga akhir tahun, diharapkan akan mencapai target 1,5 juta lot,” kata Paulus, optimis. ☺

**Volume Transaksi Per kontrak  
Jan-Apr 2015 / 2016**

Jenis Kontrak	Jan-Apr 2015	Jan-Apr 2016	Pertumbuhan (%)
Multilateral JFX	198.623,00	272.597,00	37,24
Agriculture	125.727,00	166.655,00	32,55
Metal	72.896,00	105.942,00	45,33
Multilateral BKDI	184.297,00	203.049,00	10,17
Agriculture	156.954,00	139.530,00	-11,10
Metal	26.118,00	61.623,00	135,94
PALN	1.225,00	1.896,00	54,78
Total	382.920,00	475.646,00	24,22

Sumber : Bappebti





## Pasar Karet ASEAN Peluang Bagi Indonesia?

*International Tripartite Rubber Council-* ITRC yang beranggotakan Indonesia, Thailand, dan Malaysia telah meresmikan terbentuknya *Regional Rubber Market-* RRM pada 29 April 2016, lalu, di Pattaya, Thailand. Dan pada pertemuan ITRC selanjutnya yang diselenggarakan di bulan Juni 2016, mendatang, RRM akan beroperasi guna menciptakan harga acuan karet di kawasan Asia Tenggara.

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, mengatakan, RRM merupakan pasar fisik karet yang diharapkan bisa membuat harga lebih stabil dan menahan pelemahan harga lebih lanjut ke depan.

"*Soft launching* RRM sudah dilakukan 29 April, lalu, dan di bulan Juni mendatang akan resmi beroperasi," tegas Bachrul Chairi di sela-sela media *briefing* baru-baru ini.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti, Mardjoko, sidang teknis mengenai wewenang dan tugas RRM

direncanakan diselenggarakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 2016. "Sidang itu merupakan penentuan kapan RRM bisa beroperasi," katanya.

"Pengelola pasar fisik karet dari Indonesia rencananya akan wakili Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI. Karena BKDI selama ini sudah mengikuti berbagai sidang ITRC dalam rangka pembentukan RRM kurang lebih sejak empat tahun silam," jelas Mardjoko.

Namun dikatakan Mardjoko, BKDI belum mengajukan proposal kepada Bappebti untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara RRM di Indonesia. "Kemungkinan mereka- BKDI akan mengajukan permohonan izin setelah pertemuan ITRC di bulan Juni mendatang," sebut Mardjoko.

### DPRD Prabumulih

D i lain pihak, Anggota DPRD Kota Prabumulih, yang melakukan kunjungan kerja ke Bappebti, pada 26 Mei 2016, menyambut positif atas usaha Bappebti dalam memperjuangkan

komoditi karet di tingkat ITRC. Selain itu, DPRD Kota Prabumulih juga sepakat dengan program penyerapan karet untuk kebutuhan industri di dalam negeri.

Anggota DPRD Kota Prabumulih, Nuryadi, menegaskan, penurunan harga komoditi karet selama ini di Prabumulih telah membuat para petani karet resah. "Dalam satu bulan terakhir, harga karet sempat naik dari Rp 6.500 per kg menjadi Rp 10.000 per kg. Tetapi sekarang harga karet turun kembali menjadi Rp 6.000 per kg," Nuryadi.

Menanggapi pernyataan Nuryadi, Kepala Bagian Pengembangan Pasar Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, mengatakan, saat ini pemerintah sedang melakukan beberapa hal untuk peningkatan harga karet Indonesia. Di antaranya, pembatasan kuota ekspor karet melalui kebijakan *Agreed Export Ton Scheme-* AETS kepada negara-negara anggota ITRC.

"Penetapan kuota ekspor akan diselenggarakan untuk negara anggota ITRC agar tidak terjadi kelonjakan volume ekspor komoditi karet dan diharapkan menaikkan harga jual di tingkat petani. Perbaikan harga karet 1 bulan lalu kemungkinan dikarenakan oleh kebijakan tersebut pada bulan Maret dan April," terang Dharmayugo Hermansyah.

Selain itu, tambah Dharmayugo Hermansyah, rencana perdagangan pasar fisik komoditi karet di negara anggota ITRC diharapkan dapat meningkatkan harga komoditi karet dan kesejahteraan petani karet.

"Dari sisi *seller*, dengan adanya rencana perdagangan pasar fisik komoditi karet (RRM) di negara anggota ITRC, akan menerapkan spesifikasi komoditi karet yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Dengan demikian, walaupun perdagangan karet nantinya tidak lewat pasar fisik di bursa, diharapkan para petani karet di negara anggota ITRC menjual dengan spesifikasi yang disarankan di tiga negara tersebut," terangnya.

## Ini Isi Perka Bappebti No. 2 Cegah APU dan PPT

**Antisipasi praktik  
illegal seperti money  
laundering dan  
tindakan pidana  
lainnya di industri  
perdagangan  
berjangka  
komoditi, Bappebti  
terbitkan Perka  
No. 2 Tahun 2016,  
yang mengadopsi  
Financial Action Task  
Force on Money  
Laundering- FATF.**

P eluang terjadinya tindak pidana pencucian uang di industri perdagangan berjangka komoditi- PBK memang cukup besar. Sebab itu, untuk mewaspadai terjadinya hal tersebut, Bappebti menetapkan Peraturan Kepala- Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, tentang, Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka. Atau lazim disebut *Customer Due Diligence-* CDD.

"Bappebti selama ini telah menerapkan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer-* KYC. Namun, perlu disesuaikan dengan standar internasional yang lebih komprehensif dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme," kata Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, dalam acara media *briefing* di Gedung Bappebti, belum lama ini.

Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016 yang ditetapkan Kepala Bappebti pada 18 Mei 2016, lalu, telah mengadopsi rekomendasi dari *Financial Action Task Force on Money Laundering-* FATF, yang juga dikenal sebagai Rekomendasi 40+9 FATF. "Rekomendasi tersebut menjadi acuan standar internasional dalam upaya Anti Pencucian Uang- APU, serta mendukung upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme- PPT," katanya.

"Sampai saat ini kami belum menemui ada PPT di perusahaan pialang berjangka. Dan semoga jangan sampai terjadi. Sebab itu peranan pialang berjangka dalam menerapkan program APU dan PPT dioptimalkan dan diefektifkan, sehingga mencegah perdagangan berjangka sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme," tegas Bachrul.

Dia juga bilang, dewasa ini produk,



aktivitas, dan teknologi informasi di bidang perdagangan berjangka berkembang semakin kompleks. Seiring dengan hal tersebut, muncul kekhawatiran meningkatnya peluang produk-produk perdagangan berjangka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan.

Dengan ditetapkannya Perka Bappebti ini, Bachrul Chairi, mengimbau agar seluruh pialang berjangka mengimplementasikan seluruh ketentuan yang ada dalam Perka No. 2 Tahun 2016. Pialang berjangka yang tidak patuh terhadap Perka tersebut bakal dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti. Sedangkan jika pialang berjangka tidak melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan- TKM, maka akan dikenakan sanksi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan- PPATK.

“Sebab itu dalam waktu dekat kami-Bappebti akan melakukan sosialisasi bersama dengan PPATK. Sosialisasi itu sebagai langkah persiapan dalam rangka penilaian FATF kepada penyedia jasa keuangan di bidang perdagangan berjangka komoditi,” terangnya.

Ditambahkan Bachrul Chairi, keluarnya Perka No. 2 Tahun 2016, merupakan komitmen industri perdagangan berjangka komoditi agar bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. “Pada akhirnya, kebijakan ini diharapkan dapat mendukung iklim investasi di Indonesia,” tegasnya.

## Pokok Pikiran

Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka, menyimpan sejumlah pokok pikiran. Di antaranya, penggunaan istilah *Customer Due Diligence*- CDD untuk menyempurnakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

Pengertian CDD atau Uji Tuntas Nasabah menurut Perka ini adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh Pialang

Berjangka untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/ atau pola transaksi nasabah.

“Pialang Berjangka wajib melakukan prosedur CDD pada saat; a. proses penerimaan Calon Nasabah menjadi Nasabah Pialang Berjangka; b. Nasabah melakukan transaksi Perdagangan Berjangka; c. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Nasabah; dan/atau d. terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme,” demikian bunyi Pasal 13 Perka Bappebti Nomor 2 Tahun 2016.

Selain itu, ada juga istilah Uji Tuntas Lanjut atau *Enhanced Due Diligence*- EDD. Pengertian EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan pialang berjangka terhadap calon nasabah atau nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi.

Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016,

juga menetapkan kewajiban pialang berjangka untuk menyusun, memastikan, menerapkan, dan mematuhi pedoman ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk menjalankan hal tersebut, Bappebti memutuskan bahwa direksi dan dewan komisaris perusahaan pialang berjangka harus melakukan pengawasan aktif.

Di samping itu, pada Pasal 3, Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016, disebutkan, direksi pialang berjangka wajib melakukan pengawasan aktif paling kurang: memastikan bahwa pialang berjangka memiliki pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; mengusulkan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada dewan komisaris; memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah ditetapkan.

Selain itu, direksi pialang juga harus memastikan bahwa pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sejalan



dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi pialang berjangka serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Terakhir, yakni memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara berkala.

Sedangkan untuk dewan komisaris, Pasal 4 menyebutkan, dewan komisaris pialang berjangka wajib melakukan pengawasan aktif paling sedikit: a. memberikan persetujuan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diusulkan oleh direksi; b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab direktur utama terhadap penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan c. memastikan adanya pembahasan terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam rapat direksi dan dewan komisaris.

“Pialang berjangka wajib melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bappebti,” demikian bunyi Pasal 5 untuk memperkuat keputusan dari Pasal 3 dan 4.

Di samping itu, Perka Bappebti Nomor 2 tahun 2016 juga menggunakan pendekatan berdasarkan risiko- *risk-based approach* dalam penerapan Program APU dan PPT, sehingga terdapat aturan CDD untuk area berisiko tinggi, *politically exposed persons*- orang yang populer secara politis, nasabah berisiko rendah, menengah, dan tinggi.

Selain itu, Perka tersebut mengatur pemantauan rekening, transaksi nasabah, dan pengkinian data nasabah. Pasal 31 ayat (1), menjelaskan, “Pialang berjangka wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.”

Hal lainnya, Pasal 34 Ayat (1), menetapkan bahwa pialang berjangka wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri dan/atau laporan lain kepada PPATK, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Dan sebagai informasi, Perka yang berlaku sejak 18 Mei 2016 ini, memberikan kewajiban kepada perusahaan pialang berjangka untuk menyampaikan pedoman penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bappebti paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Perka No. 2 Tahun 2016.📌





# Ini Isi R-Perpres Pasar Lelang Komoditi

**Substansi Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres) tentang PLK telah disepakati. Nantinya pokok-pokok materi itu akan dituangkan dalam peraturan presiden.**

**T**im Panitia Antar Kementerian-PAK telah berhasil menyelesaikan R-Perpres tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas- PLK. Setelah melewati beberapa kali pembahasan, Jum'at, 20 Mei 2016, lalu, bertempat di Gedung Bappebti, seluruh anggota Tim PAK akhirnya menyepakati substansi R-Perpres tersebut dengan membubuhkan tandatangan dan paraf pada halaman Rperpres.

Tim PAK penyusun R-Perpres PLK ini terdiri dari jajaran Bappebti, jajaran pejabat Kementerian Perdagangan, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri; Asisten Deputi Pengembangan Investasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, perwakilan Kementerian Pertanian, serta perwakilan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Bappebti, Sri Hariyati, dalam pengantarnya membuka pertemuan tersebut, mengatakan, hal-hal penting yang dibahas dalam rapat tersebut di antaranya terkait dengan penambahan pengaturan mengenai usulan komoditi yang akan ditetapkan oleh menteri atau gubernur yang berasal dari instansi atau lembaga dan asosiasi.

"Selain itu, menteri atau gubernur melakukan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangannya, dan perlu diatur bab khusus terkait dengan pendanaan dalam

rangka pembinaan dan pengembangan PLK oleh Gubernur atau Menteri," terang Sri.

Lebih jelasnya, Sri menuturkan beberapa pokok-pokok pengaturan dalam R-Perpres tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK. Pertama, PLK terdiri dari PLK Penyelesaian Dengan Waktu Segera- *spot* dan PLK Penyelesaian dengan Waktu Kemudian-*forward*. Kedua, lingkup pengaturan PLK, meliputi penataan PLK, pembinaan PLK dan pengembangan PLK.

Ketiga, penataan PLK *Spot* dan PLK *Forward*, di antaranya; penyelenggara PLK *Spot* hanya dapat melakukan kegiatan setelah memperoleh persetujuan dari gubernur; penyelenggara PLK *Spot* dan PLK *Forward* dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, atau Perseroan Terbatas; Penyelenggara PLK *Forward* hanya dapat melakukan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Selain itu, dalam menyelenggarakan PLK *Forward*, pihak penyelenggara PLK harus bekerjasama dengan Lembaga Penjamin. Karena itu pula, Lembaga Penjamin hanya dapat melakukan kegiatan penjaminan PLK *forward* setelah mendapat persetujuan dari menteri.

Keempat, pembinaan PLK dilakukan oleh menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dengan cara: Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan PLK; memberikan asistensi, bimbingan teknis, dan pelatihan sumber daya manusia kepada penyelenggara PLK; memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait dengan kegiatan penyelenggaraan PLK; melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggara PLK; memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha terkait.

Kelima, pengembangan PLK dilakukan oleh menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melalui: Sinergitas kebijakan dan program kerja antar kementerian/lembaga



(menteri), satuan kerja perangkat daerah / lembaga teknis daerah terkait (gubernur); pengembangan komoditas unggulan di daerah (gubernur); sinergitas penyelenggaraan PLK dengan SRG (menteri dan gubernur); meningkatkan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan PLK; memberikan kemudahan bagi sektor usaha kecil dan menengah serta kelompok usaha di bidang PLK; dan mengembangkan lebih lanjut bentuk-bentuk mekanisme PLK.

Keenam, sumber pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan PLK bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Terakhir, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PLK, jaminan transaksi, penetapan komoditas, persetujuan peraturan dan tata tertib, serta penyampaian catatan dan laporan akan diatur dengan Peraturan Menteri.

## UU Perdagangan

**T**erbitnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, memberi angin segar agar kinerja PLK lebih maksimal. Dalam Pasal 18 Ayat

(1) UU Nomor 7 Tahun 2014 menyebutkan, "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f."

Adapun bunyi dari Pasal 12 ayat (1) huruf f yaitu, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa: f. Pasar lelang komoditas."

Sementara itu, Pasal 18 Ayat (2) mengatakan, "Ketentuan mengenai penataan, pembinaan, dan pengembangan Pasar lelang komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden."

Untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itulah, Tim Panitia Antar Kementerian (PAK) berusaha menyelesaikan Rperpres tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK. Nantinya, Peraturan Presiden ini akan menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro. **S**







# SRG Mobile Perangkat KUKM Bertransaksi di Bursa Berjangka

**Kementerian Koperasi dan UKM mendorong KUKM untuk masuk ke Bursa Berjangka melalui Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas. Mungkinkah?**

Menghadapi era pasar bebas, koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) perlu meningkatkan produktivitas dan daya saingnya. Hal itulah yang membuat Kementerian Koperasi dan UKM mengundang para pelaku KUKM untuk hadir dalam sosialisasi dengan tema “Peningkatan akses KUKM ke Bursa Berjangka melalui Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang”, di Hotel Crown, Tasikmalaya, 28 April 2016, lalu.

Sesuai tema tersebut, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati, mengatakan, kementerannya akan terus berupaya meningkatkan akses para pelaku koperasi dan UKM ke bursa

berjangka melalui SRG dan pasar lelang. Menurutnya, untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas bagi KUKM, setiap daerah harus memiliki gudang SRG untuk menyimpan barang secara aman dan terawat. “Adanya gudang SRG, akan membuat petani lebih mudah melakukan transaksi perdagangan tanpa harus membawa hasil pertanian kemana-mana,” ujarnya. “Di Kabupaten tasikmalaya, baru ada satu gudang SRG yang dikelola oleh PT Pos Indonesia, tapi tetap bermitra dengan koperasi,” sambungnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas- PLK, Bappebti, Retno Rukmawati, yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut,

mengatakan, skema SRG menjadi salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. “SRG dapat memfasilitasi pemberian pembiayaan kepada pelaku usaha dengan agunan inventori yang dimiliki pelaku usaha terutama kelompok tani dan UKM.”

“Melalui SRG, komoditi pertanian saat ini sudah dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari bank/lembaga keuangan, tanpa diperlukan agunan tambahan lainnya,” jelas Retno.

Dengan demikian, tambahnya, diharapkan petani serta UKM yang umumnya menghadapi masalah keterbatasan akses pembiayaan dari

perbankan serta terbatasnya agunan kredit dapat memperoleh solusi pembiayaan melalui SRG.

## Pilot Project

SRG juga dapat diupayakan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, peningkatan kualitas dan kuantitas produk. Bahkan, dengan adanya SRG memungkinkan para pelaku usaha memperoleh kepastian kualitas dan kuantitas atas komoditas yang disimpan di gudang, keterjaminan suplai, meningkatkan *cash-flow*, serta pembiayaan bagi ekspor. Adapun dokumen resi gudang dalam transaksi *letter of credit* akan menambah keyakinan *issuing bank* dan *nominated bank*, serta dapat mencegah *fraud* dalam transaksi ekspor.

“Untuk memaksimalkan fungsi SRG, Bappebti akan meluncurkan SRG *mobile* yang terintegrasi dengan PLK dalam waktu dekat ini. Rencananya ada dua daerah yang menjadi proyek percontohan- *pilot project*, yaitu Tasikmalaya dan Ciamis,” terang Retno Rukmawati.

Dalam paparannya, Retno Rukmawati, mengatakan, tujuan diluncurkannya aplikasi SRG *Mobile* yakni untuk memberikan kemudahan bagi petani dan produsen dalam hal registrasi menjadi anggota SRG, melakukan transaksi Resi Gudang, mengakses informasi harga harian komoditi, dan jadwal pelaksanaan PLK.

Di samping itu, tambahnya, dengan SRG *Mobile* para petani dapat melakukan simulasi penghitungan biaya serta mengajukan penyimpanan komoditi di gudang SRG dan pembiayaan di bank.

Retno juga menjelaskan tentang PLK. Dia menuturkan, PLK merupakan salah satu instrumen yang mempunyai tujuan untuk memperpendek mata rantai perdagangan dengan mempertemukan para pelaku usaha (Penjual/Pembeli) secara langsung, transparan, adil dan wajar.

Sesuai dengan karakteristiknya, pasar lelang yang dibina dan diawasi oleh



Bappebti yaitu Pasar Lelang *Forward* atau penyerahan kemudian. Maksudnya, penjual cukup membawa contoh komoditas dengan spesifikasi produk yang akan dijual ke pasar lelang. Lalu, penyerahan dan pembayaran barang atau komoditinya dilakukan beberapa waktu kemudian, dan disesuaikan dengan perjanjian saat kontrak jual beli.

Antara SRG dan PLK, Bappebti mencoba untuk melakukan terobosan strategi dengan menciptakan suatu mata rantai pemasaran komoditas yang terintegrasi dengan pembiayaan. Integrasi SRG dan PLK akan menjadi instrumen yang dapat mendukung pemberdayaan petani dan UKM melalui keterbukaan akses pembiayaan oleh lembaga keuangan, mendorong terwujudnya efisiensi perdagangan, meningkatkan akses pasar bagi petani dan UKM, menciptakan referensi harga komoditas yang transparan, serta meningkatkan perekonomian rakyat sebagai fundamen perekonomian nasional.

Secara bertahap, apabila kelak SRG dan PLK bersinergi dengan baik, maka komoditi yang ada di kedua instrumen tersebut dapat juga diperdagangkan di bursa berjangka.

“Sehingga sinergisitas antara Perdagangan Berjangka Komoditi, SRG dan PLK akan terwujud,” ujar Retno Rukmawati.

## Peluang Koperasi

Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM, mengharapkan agar koperasi dapat menangkap peluang yang sudah disediakan Bappebti, untuk menjadi pengelola gudang SRG. “Ada sekitar 120 gudang dibangun Bappebti. Saat ini baru ada empat koperasi yang sudah eksis menjadi pengelola gudang,” kata Yuana

Menurut Yuana, berdasarkan data Bappebti terdapat sekitar 69 gudang yang seharusnya bisa dikelola koperasi. Nantinya, para anggotanya mau menyimpan produk atau hasil pertaniannya di gudang SRG.

“Kita mendorong agar koperasi memiliki manajemen bisnis dalam pengelolaan gudang. Ini penting karena para anggotanya dan petani bisa menyimpan hasil pertanian saat musim panen agar harga jual tidak rendah,” ujar Yuana.

Selanjutnya, dikeluarkan Resi Gudang sesuai dengan harga pasaran produk yang disimpan di gudang. “Ini dapat menjadi alternatif solusi pembiayaan bagi para pelaku usaha, terutama petani, KUKM, karena resi itu bisa dijadikan agunan untuk meminjam modal di bank,” pungkas Yuana Sutyowati.





## Media Briefing Bappebti

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, didampingi oleh Sekretaris Bappebti, Marthin, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Sri Hariyati, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar, Mardjoko dan Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Retno Rukmawati, menyampaikan keterangan perkembangan Industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) kepada media dalam acara media *briefing*. Selain itu pemaparan penetapan Perka Bappebti No. 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenai Nasabah oleh Pialang Berjangka (*Customer Due Diligence/CDD*). Jakarta, Senin (23/5)



## Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang PBK

Bappebti menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Medan, Kamis dan Jumat, (26 – 27 Mei 2016). Pertemuan Teknis ini dibuka oleh Staf Ahli Menteri Perdagangan bidang Pengamanan Pasar, Sutriono Edi dan dihadiri oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati; Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI); Perwakilan PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ); serta Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi (Aspebtindo).

Pertemuan Teknis diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang PBK, terutama Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah. Peserta dalam acara Pertemuan Teknis ini adalah para Kepala Cabang Perusahaan Pialang Berjangka yang terletak di wilayah Sumatera.

## Sosialisasi SRG di Universitas Negeri Manado

Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik, Taufik mewakili Sekretaris Bappebti membuka Sosialisasi/Kuliah Umum tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dengan tema “Sistem Resi Gudang sebagai Penggerak Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Daya Saing Bangsa” di Universitas Negeri Manado, Tondano, (26/06).

Dalam sambutannya, Taufik mengatakan, dengan telah dilaksanakannya sosialisasi ini diharapkan ke depannya mahasiswa dapat turun ke masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan memberikan pemahaman mengenai SRG. “Kami juga berharap dalam beberapa tahun ke depan agar mahasiswa dapat mengambil peran sebagai petani pengusaha, peneliti, investor, ahli komoditi, pengelola gudang, dan mengambil berbagai peran lain,” tuturnya.

Narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Staf Ahli SRG Ismadjaja Toengkagie, perwakilan dari PT Bhandha Ghara Reksha Andy Pratama, Pengelola Gudang Kab Cianjur Nana Sukatna. Adapun pesertanya berasal dari Gapoktan dan mahasiswa Universitas Negeri Manado yang berjumlah lebih dari 100 orang.



## Bappebti Tingkatkan Perlindungan Nasabah

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, memberi arahan dalam Konsinyering Implementasi Sistem Pengawasan Transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang dilaksanakan di Hotel Orchardz, Jakarta. Rabu (25/05). Dikatakan bahwa implementasi Sistem Pengawasan SPA perlu dilakukan dengan tujuan optimalisasi Pengawasan Transaksi SPA, melindungi nasabah, meminimalisir *market fraud* dan *financial fraud* dalam industri perdagangan berjangka di Indonesia. Dengan tersedianya Sistem Pengawasan Transaksi SPA yang telah dibangun oleh Bappebti, maka diharapkan akan meningkatkan integritas industri PBK dan kepercayaan Investor. Turut hadir pada acara tersebut, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriono Edi. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti Sri Hariyati, Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti Pantas Lumban Batu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Mardjoko dan beberapa pejabat Bappebti lainnya.





## Bappebti Targetkan Potong Angka Pengaduan 50 %

Sertifikasi tenaga marketing di bidang perdagangan berjangka komoditi- PBK merupakan salah satu strategi Bappebti untuk memotong angka pengaduan masyarakat hingga 50 %. Di samping itu, memperketat *trading rolls* bagi pelaku usaha PBK.

Demikian antara lain ditegaskan Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, kepada media di acara *media briefing* Bappebti baru-baru ini di Jakarta.

"Payung hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi memang tidak mengenal tenaga pemasaran. Tetapi kalangan itu nyata ada di industri ini. Karena itu kita akan lakukan sertifikasi tenaga pemasaran dengan cara seleksi yang didahului tes pembekalan di bidang perdagangan berjangka komoditi," jelas Bachrul Chairi.

Meski nantinya tenaga pemasaran sudah memiliki sertifikasi, tambah Bachrul, penanganan nasabah tetap tanggungjawabnya ada pada Wakil Pialang Berjangka.

"Jadi kalau kita sudah melakukan sertifikasi tenaga pemasaran pialang berjangka, diharapkan angka pengaduan masyarakat



bisa ditekan hingga 50 %. Karena dari data yang ada, selama ini pengaduan masyarakat bermula dari praktik ilegal tenaga marketing," katanya.

Langkah lain yang akan dilakukan Bappebti untuk menekan angka pengaduan masyarakat yakni menyempurnakan berbagai peraturan transaksi dan memberi perlindungan kepada masyarakat untuk tidak terjebak pada transaksi yang asal-asalan.

## BKDI Menargetkan Kontrak Berjangka Timah Diluncurkan Akhir 2016



Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia- BKDI yang menyelenggarakan pasar fisik komoditi timah sejak tahun 2014 lalu, dianggap sukses mengangkat harga timah di dalam negeri dan berkontribusi terhadap pergerakan harga timah di pasar internasional.

"Kita mengapresiasi upaya BKDI yang menyelenggarakan pasar fisik timah di dalam negeri. Kehadiran BKDI di kancah pasar fisik timah telah membuat pergerakan semakin dinamis.

Bahkan, pasar internasional mengikuti pergerakan harga harian timah di BKDI," ujar Kepala Bappebti, Bachrul Chairi, kepada media di saat acara *media briefing*, baru-baru ini di Gedung Bappebti.

Dari keterangan BKDI beberapa waktu lalu, dikatakan BKDI telah merencanakan meluncurkan kontrak berjangka timah di akhir tahun 2016, ini, tambah Bachrul.

"Tentunya kami- Bappebti akan mendukung rencana BKDI tersebut. Karena, kehadiran kontrak berjangka timah akan melindungi para pelaku di pasar fisik timah dari fluktuasi harga," terang Bachrul Chairi.

Jadi, nantinya dengan adanya kontrak berjangka timah itu akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir timah di pasar internasional, tambah Bachrul Chairi.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Mardjoko, mengatakan rencana BKDI meluncurkan kontrak berjangka timah telah diwacanakan sejak setahun silam. "Tetapi tampaknya mereka- BKDI masih menunggu momen yang tepat," katanya.

"Rencana mereka meluncurkan kontrak berjangka timah di akhir tahun ini. Makanya kami menunggu proposal BKDI untuk memperoleh izin dari Bappebti," jelas Mardjoko.

## SNI Silo Jagung Dalam Skema SRG Dukung Pembatasan Impor

Pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menargetkan tahun 2017 menutup keran impor jagung, mendapat sambutan positif dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan Pasar Lelang Komoditas- PLK, Bappebti, Retno Rukmawati.

"Dengan pembatasan impor akan membuka peluang bagi petani untuk budidaya jagung. Di sisi lain, bisnis Sistem Resi Gudang- SRG jagung juga akan berjalan dan semakin menarik," kata Retno Rukmawati.

Hal lain yang membuat Retno Rukmawati bersemangat, yakni, Badan Standardisasi Nasional pada 29 Februari 2016 lalu, telah menerbitkan Standar Nasional Indonesia- SNI silo tempat penyimpanan komoditas pertanian. SNI 8278:2016 itu, diantaranya mengatur dan menjadi pedoman silo penyimpanan komoditi biji-bijian.

"Jadi dengan SNI 8278 itu, akan menunjang efektifitas pelaksanaan SRG di sentra produksi sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang SRG," tegasnya.

Di samping itu, tambah Retno Rukmawati, SNI 8278 akan menunjang kelancaran distribusi dan perdagangan komoditas pertanian terutama komoditas biji-bijian seperti jagung.



Sementara itu, dalam keterangan Mentan Andi Amran Sulaiman, impor jagung di tahun 2016 telah ditekan hingga 50 % dibandingkan 2015 lalu. Bila tahun lalu impor jagung mencapai 3,1 juta ton, maka pada tahun 2016 ini tinggal 1 juta ton. Bahkan, sampai bulan Mei 2016, realisasi impor jagung baru mencapai 700.000 ton.

## FTLC Corong PBK di Perguruan Tinggi



Jakarta Futures Exchange- JFX bersama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) melakukan program edukasi perdagangan berjangka komoditi- PBK dan sekaligus meresmikan perubahan nama JFX Center menjadi *Futures Trading Learning Center- FTLC*.

"FTLC memiliki makna dan fungsi yang lebih luas, yakni sebagai sarana pengenalan perdagangan berjangka komoditi kepada mahasiswa dan masyarakat umum di sekitar wilayah kampus," kata Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang dalam sambutannya pada peresmian FTLC Politeknik Negeri Bandung, 23 Mei 2016, lalu.

Hadir dalam acara itu diantaranya, Direktur Politeknik Negeri Bandung, Rachmad Imbang Tritjahjono MT, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Tris Sudarto dan Direktur Utama PT Agrodana Futures, Laurentius Gunawan.

Ditambahkan Paulus, untuk program FTLC selanjutnya akan dibuka di Universitas Nommensen Medan dan Universitas Klabat Manado pada bulan Agustus 2016, mendatang. Dengan tambahan 2 FTLC di tahun 2016 jumlah FTLC- JFX menjadi sebanyak 18 yang tersebar di berbagai perguruan tinggi.

"Kami sangat mengharapkan kehadiran FTLC di perguruan tinggi bisa menjadi wahana kalangan akademisi mengembangkan perdagangan berjangka dari sisi keilmuan dan membuka peluang perdagangan berjangka komoditi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di tingkat perguruan tinggi," papar Stephanus Paulus Lumintang.





## Dampak El Nino, Produksi Kopi Diprediksi Turun

**A**sosiasi Eksportir Kopi Indonesia- AEKI memprediksi produksi kopi Indonesia tahun 2016 akan kembali turun atau tinggal sekitar 625.000 ton sebagai dampak kekeringan beberapa waktu lalu. "El Nino memang sudah diprediksi dan dikhawatirkan sejak tahun lalu dan itu membuat prediksi adanya penurunan produksi kopi nasional dari 680.000 ton tahun 2015 menjadi hanya sekitar 625.000 ton pada 2016," kata Ketua Umum AEKI, Irfan Anwar, baru-baru ini di Medan, Sumut.

Menurut Irfan, produksi kopi Indonesia dalam beberapa tahun memang terus turun terdampak kondisi cuaca, tanaman tua, peralihan tanaman robusta ke arabika hingga penebangan pohon dan penggantian dengan tanaman lain. Produksi kopi tertinggi masih terjadi di tahun 2012 lalu, yakni sebanyak 750.000 ton. Adapun luas lahan kopi nasional berkisar 1,2 juta hektare, di mana yang produktif tinggal sekitar 950.000 hektare. Peningkatan produksi baik dengan cara peningkatan areal dan produktivitas kopi dinilai penting mengingat kopi menjadi komoditas andalan ekspor maupun kebutuhan pasar dalam negeri. "Pasar di dalam negeri semakin membaik dengan meningkatnya tren minum kopi khususnya di kalangan anak muda yang jumlahnya cukup besar secara nasional," katanya. Irfan Anwar menegaskan, peningkatan produksi juga harus diikuti dengan kualitas yang semakin baik pula agar tidak kalah bersaing dengan kopi yang dihasilkan negara produsen lain seperti Brazil, Vietnam dan Kolombia. Indonesia dewasa ini masih menjadi negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Vietnam.



## Mulai 2017 Pemerintah Stop Impor Jagung

**K**ontroversi soal kebijakan pembatasan Impor Jagung yang ditetapkan Kementerian Pertanian tahun ini bakal berlanjut ke tahun depan. Rencananya, tak hanya sekedar membatasi impor jagung, tahun depan Kementan juga akan menutup keran impor jagung.

Kebijakan ini diambil karena mempertimbangkan produksi jagung lokal telah mencukupi kebutuhan perusahaan pakan ternak selaku importir tetap jagung. Rencana ini juga telah disampaikan Mentan, Andi Amran Sulaiman, kepada pengurus Gabungan Perusahaan Makanan Ternak- GPMT pada sebuah pertemuan baru-baru ini di Kementan.

Mentan Andi Amran Sulaiman, mengatakan, saat ini impor jagung telah ditekan lebih dari 50 % dibandingkan tahun 2015 lalu. Bila tahun lalu impor jagung mencapai 3,1 juta ton, maka pada tahun 2016 ini tinggal 1 juta ton. Bahkan, sampai bulan Mei 2016, realisasi impor jagung baru mencapai 700.000 ton dan didatangkan lewat Perum Bulog. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda dari Kementan untuk merekomendasikan sisa kuota impor sebanyak 300.000 ton.

Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan pakan ternak ini, Amran meminta agar pengusaha menyerap jagung petani yang akan panen pada semester dua tahun ini.

"Bulan Agustus sampai September akan terjadi puncak panen jagung di dalam negeri. Untuk itu perusahaan pakan ternak diminta agar menyerap jagung petani," ujar Amran.

Meski sudah diputuskan untuk stop impor jagung, namun Amran, mengatakan, penutupan impor jagung di tahun depan akan memperhatikan stok dan kondisi jagung dalam negeri pada akhir tahun. "Melihat kondisi tanaman jagung dan pasokan jagung lokal, saya optimistis impor jagung bisa 0 % bisa terlaksana di tahun depan," tegas Andi Amran Sulaiman.

## 4 steps to avoid illegal investment

**C**oFTRA once again reminds the people to be more careful, sharp and thorough when choosing brokerage companies for investment so they will not be trapped on illegal investment.

"For investing on futures trading, people are encouraged to do 4 steps prior," Sri Hariyati, on one of events in Bandung, West Java.

Moreover Sri Hariyati explained that the first step needs to be done is doing some checking on the legality of futures broker company that are offering investment at [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id) webpage.

Second, identify the level of investment risks.

Third, check on Futures Broker Company's account whether or not the company a segregated account for their customer's funds.

Fourth, avoid the lure of high profit and fixed income.

"To get further info, do not hesitate to contact CoFTRA via email, phone on (021) 31924744 or sms service centre on 0811-1109901," Sri Hariyati emphasized.

As an illustration, up until now there are 67 futures broker



companies that have obtained business licenses from CoFTRA. There are 2 futures exchange and 2 futures clearing house and 1 association that got approval from CoFTRA.



## Jamkrindo waits for Government Capital Program on Warehouse Receipt System Guarantee

**A**fter the issuance of Government Regulation No.1 Year 2016 in regards to LPP-SRG; Implementing agencies of warehouse receipt system guarantee, President Director of Jamkrindo, Diding S. Anwar hopes that SRG guarantee can be in realization at the soonest.

In order to implement the task, Jamkrindo needs to establish the state capital investment. This refers to clause 26, government regulation No.1 Year 2016, states; "the implementing agencies begin the action of SRG guarantee right after they receive the government capital."

"So if there is a question when Jamkrindo will do SRG guarantee, they need to be patient until PMN is launched. Hopefully by the time of APBN changing in 2016, the PMN can also be ratified by the government and legislative member," Diding explained.

Diding also emphasized that currently Jamkrindo is in the



middle of drafting business plan and together with the Ministry of State-Owned Enterprises ministry and the Ministry of Trade study the state capital investment to be proposed on APBN-P 2016 to Indonesian House of Representative.

According to Diding S.Anwar, the success of SRG guarantee program that is held by Jamkrindo cannot be separated from all SRG stakeholder support. Besides that, people and especially farmers needs to be enthusiastic welcoming the presence of LPP-SRG.

"Therefore in the near future Jamkrindo will hold an SRG national seminar by inviting all SRG's stakeholder. The aim of this event is to

make people more aware on the existence of SRG. Jamkrindo will also do some socialization on SRG's benefit to all areas that has agriculture potency but not yet has many commodity stored in SRG's warehouse," Diding S.Anwar concluded.







Mulyono, Wonosobo, Jateng (39)

081329398xxx

Tanya;

Kepada Yth. Bappebti;

Profesi saya sekitar 6 tahun ini adalah pedagang pengumpul, tapi masih tergolong kecil karena keterbatasan permodalan. Sejak menjalani profesi ini, saya lebih banyak menampung hasil panen komoditi tembakau petani yang ada di sekitar wilayah Wonosobo. Di saat harga tembakau bagus, pendapatan saya cukup lumayan. Namun, terkadang hanya balik modal karena saat dijual kembali harganya merosot.

Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dapatkah komoditi tembakau disimpan di gudang Sistem Resi Gudang dan bagaimana caranya?

Jawaban:

Komoditi tembakau sejatinya berpotensi dan dapat dijadikan sebagai subjek Sistem Resi Gudang- SRG. Namun saat ini belum menjadi subjek SRG. Karena itu saran kami, Bapak dapat mengusulkan kepada pemerintah daerah dan dinas terkait agar menyampaikan permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk menjadikan komoditi tembakau sebagai subjek Resi Gudang. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2011, tentang Sistem Resi Gudang, subjek SRG ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Hingga saat ini telah ada sebanyak 10 komoditi yang menjadi subjek SRG, yakni, komoditi karet, kakao, kopi, lada, beras, gabah, jagung, lada, rumput laut dan garam.

Terima kasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI  
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

\*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

## Glossary

### 1. Contango

Market situation in which prices in succeeding delivery months are progressively higher than in the nearest delivery month; the opposite of “backwardation”.

### 2. Contract

(1) A term of references describing a unit of trading for a commodity future or option; (2) An agreement to buy or sell a specified commodity, detailing the amount and grade of the product and the date on which the contract will mature and become deliverable.

### 3. Contract Grades

Those grades of a commodity or financial instrument which have been officially approved by the exchange as deliverable in settlement of a futures contract.

### 4. Contract Grades

Those grades of a commodity which have been officially approved by an exchange as deliverable in settlement of a futures contract.

### 5. Contract Market

(1) A board of trade or exchange designated by the Commodity Futures Trading Commission to trade futures or options under the Commodity Exchange Act; (2)

### 6. Contract Month

The month in which delivery is to be made in accordance with a futures contract.

### 7. Contract Month

See Delivery Month.

### 8. Contract Unit

The actual amount of a commodity designated in a given futures contract.

### 9. Contract Unit

The actual amount of a commodity represented in a contract.

### 10. Controlled Account

Any account for which trading is directed by someone other than the owner. Also called a Managed Account or a Discretionary Account.



## Penerbitan Resi Gudang Bulan April 2016

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN				
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Volume Komoditi (ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1	PT. BGR (PERSERO)					
	- Gudang Wonogiri	Gabah	1	30,00	5.000	150.000.000
	- Gudang Bireuen	Gabah	2	99,92	5.300	529.576.000
	- Gudang Kuningan	Gabah	2	40,00	5.000	200.000.000
	- Gudang Tapin	Gabah	1	10,07	4.500	45.297.000
	- Gudang Probolinggo	Gabah	1	18,32	4.150	76.019.700
	- Gudang Banyuasin	Gabah	2	35,70	3.500	124.950.000
2	PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA					
	- Gudang Daya Tani Ngawi	Beras	3	250,00	7.500	1.875.000.000
	- Gudang Bogor	Gabah	4	33,78	4.521	152.700.200
3	PT. POS INDONESIA (PERSERO)					
	- Gudang Tasikmalaya	Gabah	4	50,00	5.360	268.000.000
		Jagung	10	270,00	4.000	1.080.000.000
4	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Gudang Cianjur	Gabah	10	170,53	6.174	1.052.834.000
5	PT. PERTANI (PERSERO)					
	- Gudang Grobogan	Gabah	2	31,50	5.200	163.800.000
JUMLAH		Gabah	29	519,81		2.763.176.900
		Beras	3	250,00		1.875.000.000
		Jagung	10	270,00		1.080.000.000
TOTAL			42	1.039,81		5.718.176.900

## Pembiayaan Resi Gudang Bulan April 2016

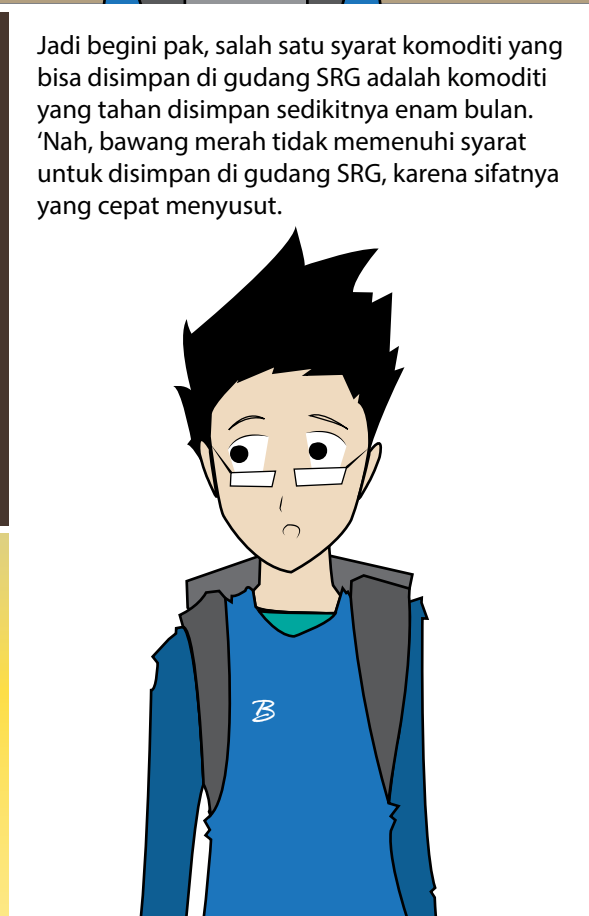
NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN				PEMBIAYAAN		
		Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Volume (ton)	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKNB
1	PT. BGR (PERSERO)							
	- Gudang Wonogiri	Gabah	1	30,00	150.000.000	-	-	-
	- Gudang Bireuen	Gabah	2	99,92	529.576.000	-	-	-
	- Gudang Kuningan	Gabah	2	40,00	200.000.000	1	63.000.000	BJB
	- Gudang Tapin	Gabah	1	10,07	45.297.000	1	31.000.000	Bank Kalsel
	- Gudang Probolinggo	Gabah	1	18,32	76.019.700	-	-	-
	- Gudang Banyuasin	Gabah	2	35,70	124.950.000	-	-	-
2	PT. FOOD STATION TJIPINANG JAYA							
	- Gudang Daya Tani Ngawi	Beras	3	250,00	1.875.000.000	-	-	-
	- Gudang Bogor	Gabah	4	33,78	152.700.200	-	-	-
3	PT. POS INDONESIA (PERSERO)							
	- Gudang Tasikmalaya	Gabah	4	50,00	268.000.000	2	113.000.000	BJB
		Jagung	10	270,00	1.080.000.000	7	525.000.000	BJB
4	KOPERASI NIAGA MUKTI							
	- Gudang Cianjur	Gabah	10	170,53	1.052.834.000	10	729.825.000	BJB
5	PT. PERTANI (PERSERO)							
	- Gudang Grobogan	Gabah	2	31,50	163.800.000	-	-	-
JUMLAH		Gabah	29	519,81	2.763.176.900	14	936.825.000	
		Beras	3	250,00	1.875.000.000	-	-	
		Jagung	10	270,00	1.080.000.000	7	525.000.000	
TOTAL			42	1.039,81	5.718.176.900	21	1.461.825.000	

Sumber : BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SRG DAN PLK, BAPPEBTI

Catatan : Gudang yang dibangun menggunakan APBN



## SRG Kontrol Harga dan Tekan Inflasi







Lie Ricky Ferlianto \*)

## Part I

# KBE Produk Multiguna JFX

Kontrak Berkala Emas- KBE merupakan salah satu produk emas yang diperdagangkan di bursa berjangka Jakarta Futures Exchange- JFX. Kontrak ini bukan merupakan kontrak gulir harian yang tidak memiliki jatuh tempo, tapi juga bukan kontrak berjangka yang waktu jatuh temponya sangat baku. Namun KBE merupakan gabungan dari keduanya, dan gabungan dari jenis perdagangan lainnya.

Kontrak ini merupakan kontrak pertama di dunia perdagangan berjangka yang bersifat *hybrid*, karena menggabungkan unsur-unsur kontrak berjangka, kontrak gulir harian, transaksi pasar fisik. Dengan hibridisasi seperti ini, maka kelebihan-kelebihan dari produk-produk investasi emas lainnya bisa diakomodir didalamnya, sementara kekurangan-kekurangannya dapat diminimalisir

(bila tidak bisa dikatakan dieliminir). KBE yang merupakan kontrak berjangka dengan jangka waktu hanya satu bulan saja dengan waktu jatuh tempo pada akhir bulan. Pada saat tiga hari sebelum jatuh tempo Nasabah Beli (*Buyer Option*) sudah bisa mengajukan untuk menerima emas fisik (*Delivery*) di 12 lokasi cabang Pegadaian, namun di saat pemesanan nasabah harus melakukan pelunasan atas emas yang dibelinya. Atau, mempertahankan posisinya ke bulan berikutnya (*Gulir/Rollover*) tanpa batasan waktu lamanya mempertahankan posisi ke bulan berikutnya. Selain itu, nasabah juga dapat melikuidasi posisinya pada saat kapan pun.

Maka nasabah yang ingin mempertahankan posisi di pasar dengan perkiraan bisa memperoleh keuntungan lebih besar, maka pada saat jatuh tempo kontrak, nasabah bisa memutuskan

untuk menggulirkan emasnya ke bulan berikutnya. Dengan demikian, nasabah memiliki fleksibilitas lebih dibandingkan dengan kontrak berjangka konvensional maupun kontrak gulir harian. Nasabah berpotensi menerima emas, dan pada saat yang bersamaan bisa menjaga posisi terbuka untuk waktu yang lebih lama. Agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, maka variasi kontrak yang diperjualbelikan dalam KBE bervariasi mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan paling besar 100 gram. Kontrak Berkala Emas, seperti halnya kontrak berjangka ataupun kontrak gulir harian di bursa, bagi pembeli dikenakan *initial* margin sebesar 10 % dari nilai emas saat pembelian dilakukan sedangkan penjual menempatkan jaminan berupa batangan emas sesuai dengan satuan kontrak yang dijualnya sebesar 100 % yang ditempatkan pada lembaga kliring berjangka.

Untuk menyeimbangkan margin dengan batangan emas 100 %, perlu ada pembiayaan. Karena bagi penjual, mereka tetap mendapatkan pembayaran penuh layaknya mereka menjual di pasar fisik. Pembeli yang baru melakukan transaksi menyetorkan margin 10 % dari nilai transaksi, artinya mendapat pembiayaan 90 % dalam proses transaksi tersebut. Oleh karena itu ada bunga yang harus dibayar pembeli dari nilai pembiayaan tersebut.

Nilai pembiayaan KEB pun akan bersifat tetap terhadap harga transaksi. Pembeli memiliki fleksibilitas untuk menambahkan setoran margin berapa pun, kapan pun, setiap penambahan margin yang dilakukan oleh pembeli, dengan sendirinya akan mengurangi nilai pembiayaan. Hal ini menjadi serupa dengan cicilan atas emas yang dibeli. Nilai cicilannya tidak ditentukan, sehingga sepenuhnya tergantung kemampuan dan tergantung perencanaan dari pembeli.

Bilamana margin yang dibayarkan sudah 100 %, maka sudah tidak ada lagi pembiayaan, dan tidak ada lagi bunga yang harus dibayarkan oleh pembeli.

**“Pembeli selalu memiliki pilihan untuk terus menjaga posisi terbuka, menjual kapan pun bila dirasakan telah memberi keuntungan, menggulirkannya ke bulan kontrak berikutnya, ataupun meminta serah terima fisik pada saat jatuh tempo.”**

Perlu juga dicatat, bahwa pembeli yang telah melunasi dengan menyetor 100 % margin, tidak berarti harus mengambil emas tersebut. Pembeli selalu memiliki pilihan untuk terus menjaga posisi terbuka, menjual kapan pun bila dirasakan telah memberi keuntungan, menggulirkannya ke bulan kontrak berikutnya, ataupun meminta serah terima fisik pada saat jatuh tempo. Sehingga fleksibilitas transaksi ada di tangan pembeli. Bilamana melakukan gadai emas, nasabah ada peluang untuk memperpanjang periode gadai. Saat melakukan perpanjangan ini, maka dilakukan penyesuaian pada harga emas yang berakibat pada besaran “bunga atau biaya titip”. Lalu ada beberapa toko yang menawarkan fasilitas gadai, memberikan fasilitas *buy back* tanpa memperhitungkan ongkos cetak emas batangan di Antam. Hal ini bisa dilakukan karena proses gadai bisa tanpa melibatkan perpindahan emas. Karena pembeli seolah membeli emas senilai 100 % harga emas. Lalu menggadaikan emas di toko yang sama dengan pembiayaan 80 %. Artinya, nasabah hanya menyerahkan pembayaran 20 %, lalu emas tetap tersimpan di toko emas. Nasabah lalu diberi waktu untuk “mengembalikan” pembiayaannya dengan “bunga atau biaya titip”. Bila nasabah memutuskan untuk menjual emas kembali, maka toko bisa memberikan *rate buy-back* yang tinggi karena tidak

memperhitungkan ongkos cetak emas. Dalam transaksi KBE, pembeli memang menyetorkan ongkos cetak emas saat melakukan pembelian. Namun sifatnya sebagai jaminan saja. Bila pembeli melakukan *re-sell* atas kontrak emasnya, maka ongkos cetak itu akan dikembalikan kepada pembeli. Selain itu, saat kontrak jatuh tempo dan pembeli memutuskan untuk memperpanjang waktu kepemilikan posisi kontrak emasnya, juga akan dilakukan penyesuaian, yang dalam istilah bursa disebut sebagai “*marked to market*”. Posisi beli nasabah seolah di *re-sell* pada harga terakhir saat jatuh tempo, dan dibukakan kembali pada harga yang sama untuk bulan kontrak berikutnya. Bila pada akhirnya pembeli memutuskan untuk menerima fisik emas, tentu ongkos cetak tidak akan dikembalikan.

Selain itu, ada satu biaya lagi yang perlu dibayarkan, yaitu ongkos kirim. Transaksi Kontrak Berkala Emas juga memanfaatkan sistem transaksi *online*. Dengan transaksi *online*, seorang pembeli produk ini bisa berasal dari mana saja. Sedangkan untuk memudahkan para pembeli, JFX dan lembaga kliring berjangka telah bekerjasama dengan PT Pegadaian sebagai lokasi serah terima emas. Sehingga pembeli bisa memilih lokasi pegadaian terdekat untuk pengambilan emasnya. Kepala Divisi Research & Business Development Jakarta Futures Exchange





## Lisensi Lokal, Standar Internasional

Dirut GKIB, M. Ali Jaya

**Belasan tahun berkarier di bursa berjangka, kini M. Ali Jaya banting stir menahkodai sebuah perusahaan pialang, yakni PT. Global Kapital Investama Berjangka- GKIB.**

Jakarta Futures Exchange-JFX menjadi tempat awal M. Ali Jaya memulai karir di industri perdagangan berjangka komoditi. Sebelum *first trading days* JFX pada 15 Desember 2000 silam, sekitar enam bulan dia dan tim IT- teknologi informasi lainnya berjibaku mempersiapkan sistem perdagangan. "Kami diberi target bulan Juni hingga November 2000 untuk membuat sistem perdagangan di JFX. Siang malam kami kerjakan untuk membuat sistem tersebut," akunya.

Dari hasil kerja keras tim IT JFX itu, terciptanyalah sistem perdagangan JFX yang dikenal *Jakarta Futures Electronic Trading System- JAFetS*. "Awalnya sistem itu agak mulus 'sih, tapi masih ada *down*-nya, *hang*-nya. Tapi, sistem ini dipakai sampai tahun 2003, dan sekarang JAFetS-nya sudah dikembangkan lagi," terang Ali yang pernah bekerja sebagai manajer IT

di sebuah perusahaan Australia ini.

Sekitar 11 tahun berkarir di JFX, Alumni Universitas Gunadarma ini pun hijrah ke Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia-BKDI dengan posisi direksi selama 3,5 tahun. Setelah itu, di awal tahun 2016, Ali Jaya muncul dengan wajah baru. Dia mendeklarasikan sebagai Direktur Utama PT. Global Kapital Investama Berjangka-GKIB.

"Dengan masuk ke pialang berjangka, saya masuk ke dunia praktiknya langsung. Kalau di SRO- *self regulatory organization*, masih ada satu tahap yang saya tidak bisa langsung ke nasabah," ungkapnya.

"Kalau melihat struktur dan hirarki, saat ini saya memang ada di bawah. Tapi kalau melihat secara wewenang dan tantangannya, saya justru naik," tambahnya.

Meski telah lama bergelut di bursa berjangka, jangan dikira ayah dari dua

orang anak ini, tak piawai dalam urusan masalah pialang. Di JFX, ternyata Ali tak hanya mengurus soal sistem saja. Dia juga mengurus masalah audit dan *business development*.

"Selama di bursa berjangka, saya banyak bergaul dengan pialang. Jadi interkoneksi saya dengan pialang-pialang lain sangat baik. Saat itu, banyak pialang yang berdiskusi dengan saya tentang mekanisme *trading*, tentang audit, pengembangan produk dan segala macamnya," ujarnya.

### Ritel

Menurut pria kelahiran Bogor, 1970, ini, GKIB akan diarahkan sebagai perusahaan pialang berjangka yang mengandalkan kemajuan teknologi informasi. "Melalui *digital marketing* kami akan membangun *brand image* GKIB yang terbaik, terpercaya dan *friendly*," katanya.

Dia mencontohkan, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang melakukan *trading* melalui pialang luar negeri yang notabene ilegal. "Pialangnya ada di luar negeri, tapi 'kok orang mau untuk *trading* dan percaya menyerahkan uangnya? Ini lantaran mereka sudah percaya," ucapnya.

Belajar dari hal tersebut, Ali pun akan menerapkan GKIB untuk menggunakan standar pelayanan pialang luar negeri. "Jadi kami menggunakan standar luar negeri dengan lisensi lokal," katanya bersemangat.

Dia juga berharap bisa mendapatkan nasabah yang sudah berpengalaman. Dari kacamata, nasabah yang masih awam cenderung menimbulkan banyak masalah. "Secara pribadi saya lebih cenderung membidik nasabah ritel daripada yang nasabah besar. Karena risikonya lebih kecil, walaupun komisinya kecil. Tetapi konsekuensinya tetap sama di mata SRO dan otoritas," tegasnya.

Dengan kemajuan IT saat ini, GKIB tak tertarik untuk membuka cabang di daerah. "Buat apa buka cabang? Dengan sistem *online* ini, cabang kami bisa ada dimana-mana. Ada di google, facebook,

dan lain-lain," katanya sambil tersenyum.

Dia juga bilang, sudah saatnya masyarakat tak hanya memandang fisik dari sebuah perusahaan pialang. Karena menurut Ali, belum tentu yang 'kinlong' itu jaminannya bagus. "Jadi, adanya kantor cabang di daerah tak mesti wajib ada. Apalagi perkembangan pengguna *smartphone* begitu pesat, sehingga *anytime and anywhere* bisa *trading*," ujarnya.

Dengan demikian, idealnya, makin mudah transaksi, maka makin banyak juga volume transaksinya. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa semakin mudah bertransaksi, justru volume transaksinya begitu minim? Menurut Ali, bukan teknologinya yang hilang, tapi *sense* bisnisnya dari produk bursa berjangka ataupun pialanglah yang tidak ada. "Jadi kalau menurut hemat saya, industri ini perlu membangun *interest* bisnisnya, lalu dorong transaksi dengan kemajuan teknologi," ujarnya.



"Mencapai target transaksi kontrak multilateral seperti yang dikehendaki otoritas, bukanlah hal yang mudah. Sedangkan untuk produk bilateral-Sistem Perdagangan Alternatif, kami memang cukup optimis. Meski begitu, kami cukup yakin bisa meyelaraskan baik itu multilateral maupun SPA," ujarnya.

Sebab itu pula, Ali Jaya sangat berharap pemerintah mendorong berkembangnya pasar fisik komoditi. Kalau pasar fisik komoditi di Indonesia bisa digenjot dengan kaya komoditi unggulan ekspor, dengan sendirinya pasar *futures* akan ikut berkembang.

"Kalau pasar fisiknya berjalan bagus dan rapi, lalu harga sudah transparan, maka pelaku komoditi pasti butuh *hedging*. Dan *hedging* itu ada di pasar *futures*. Jadi harus urut. Ibarat bangun rumah, bikin pondasinya dulu baru terakhir atapnya yaitu pasar *futures*," tandas Ali Jaya.



# BIJAK BERINVESTASI



**Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi - Bappebti**  
**[www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)**